BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia, yang memiliki siklus erupsi 4-8 tahun sekali. Pada 10 tahun terakhir, tercatat dua erupsi yang terjadi pada tahun 2006 dan puncaknya pada tahun 2010 yang diperkirakan merupakan siklus ulang 100 tahunan Gunung Merapi (Surono et al., 2012, hal. 123). Erupsi merapi di tahun 2010 merupakan erupsi dengan energi terbesar seperti yang dikatakan oleh Surono (Mantan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM) dengan kerusakan dan kerugian sebesar Rp4,23 trilyun (www.bnpb.go.id diakses pada 14 Januari 2019). Pasca erupsi Merapi pemerintah menetapkan ulang daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat 14:

> Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan Rawan Bencana (KRB) dibagi menjadi 3 yaitu: KRB-1, KRB-2, dan KRB-3. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), KRB-1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan memungkinkan untuk terkena perluasan awan panas dan aliran lava, KRB-2 adalah kawasan yang masyarakatnya diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan status. KRB-3 kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguan lava, lontaran batu pijar, dan/ atau gas beracun serta kawasan yang jaraknya paling dekat dengan bencana tidak boleh dihuni (www.bnpb.go.id diakses pada 14 Januari 2019).

Dampak dari erupsi merapi 2010 adalah meluasnya peta Kawasan Rawan Bencana III (KRB-3), kawasan yang letaknya semakin dekat dengan sumber bahaya. Berdasarkan dengan data BNPB terdapat 9 dusun di Kabupaten Sleman

yang termasuk ke dalam KRB-3 yaitu Dusun Kaliadem, Dusun Petung, Dusun Jambu, Dusun Kopeng, Dusun Pelemsari, Dusun Pangkurejo, Dusun Srunen, Dusun Kalitengah Lor dan Dusun Kalitengah Kidul (www.bnpb.go.id diakses pada 10 Januari 2019).

Sehubungan dengan adanya hal tersebut maka konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat lereng gunung Merapi ialah meninggalkan tanah kelahirannya yang termasuk ke dalam KRB 3 yang tidak boleh dihuni. Selain tidak mendapatkan izin sebagai tempat hunian, masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan atau mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 36 ayat 1b:

1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
   a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;dan/atau
   b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007)

Pemerintah telah menetapkan daftar kawasan terlarang untuk dijadikan pemukiman, dengan adanya nama-nama dusun atau padukuhan yang masuk ke dalam kawasan rawan bencana yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis akan lebih berfokus pada Padukuhan Pangukrejo.

Dukuh Pangukrejo merupakan bagian dari Desa Umbulharjo yang menjadi salah satu padukuhan terdampak erupsi Merapi. Selain itu kepala dukuh kembali ke KRB 3 dikarenakan masyarakatnya menolak untuk direlokasi dan memilih melanjutkan hidupnya di kawasan rawan bencana yang seharusnya *zero activity*. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, masih banyak warga yang kembali ke tanah asal dan melakukan aktivitas sehari-hari layaknya sebelum erupsi merapi 2010, dengan bertambahnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan bagi masyarakat yang terdampak erupsi untuk melakukan relokasi ke hunian tetap (huntap), dan setiap warga yang melakukan relokasi ke huntap mendapatkan dana intensif sebesar Rp30 juta.

Meskipun kebijakan tersebut telah dibuat oleh pemerintah, mayoritas warga menolak dan tetap memilih untuk tinggal di KRB-3 dengan alasan mata pencaharian dan sektor perekonomian yang utama terdapat di KRB 3. Warga khawatir jika berpindah ke huntap akan mempersulit akses untuk mendapatkan bahan pangan ternak yang mana sebelumnya warga lereng merapi bermata pencaharian pada sektor pertanian dan peternakan. Namun terdapat beberapa warga yang menerima dana intensif dari pemerintah akan tetapi memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah KRB 3. Saat ini KRB 3 menjadi destinasi wisata lokal maupun mancanegara dengan adanya Lava Tour, Wisata Kaliadem, Batu Alien dan lain lain. KRB 3 saat ini menjadi kawasan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar, KRB 3 yang seharusnya tidak terdapat aktivitas kehidupan menjadi ramai dengan adanya para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung.

Jika dikaitkan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, antara idealitas dengan realitas yang terjadi pada masyarakat berbeda jauh. Masih banyak warga yang tinggal di KRB 3, sedangkan di dalam aturan pemerintah terdapat larangan untuk tetap bermukim di kawasan rawan bencana dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak erupsi. Dengan kata lain, jika semakin banyak orang yang datang ke KRB 3, maka akan semakin banyak pula, masyarakat yang rentan terkena dampak erupsi merapi jika kembali terjadi.

Hal ini terlihat seperti masyarakat menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat lereng Merapi memilih untuk tetap berada di tanah asalnya dan secara tidak langsung terjadi pemberontakan. Seperti halnya yang telah dijelaskan James Scott (2009) dalam bukunya yang berjudul *"The Art of Not Being Governed"*, ketika masyarakat *Zomia* memilih untuk tinggal di dataran tinggi karena tidak ingin terikat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah (penghindaran Negara) yang ada di dataran rendah sehingga masyarakat *Zomia* dianggap barbar. Pemerintah dianggap kurang memahami kondisi masyarakat *Zomia* dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal yang terjadi di *Zomia* memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Dukuh Pangukrejo.

Terjadi perbedaan definisi konstruksi ruang, bagaimana definisi ruang itu dibentuk atau diproduksi, antara pemerintah dengan masyarakat sekitar lereng Merapi. Namun jika dikaitkan dengan penelitian ini, konstruksi ruang yang

dimaksud ialah bagaimana masyarakat mendefiniskan kawasan rawan bencana. Menurut Lefebvre konstruksi ruang terbentuk berdasarkan produk sosial yang ada di masyarakat. Pengertian kontruksi ruang yang dipresentasikan oleh pemerintah berbeda dengan arti ruang yang dipahami masyarakat Dukuh Pangukrejo, sehingga dalam hal ini penulis akan meneliti tentang bagaimana kontruksi ruang terjadi di Dukuh Pangukrejo.

Menurut Henry Lefebvre (1991) terdapat tiga konsep yang mempengaruhi seseorang atau suatu masyarakat dalam mengkontruksi ruang: yang pertama di pengaruhi oleh praktik spasial ruang, yang kedua bagaimana masyarakat merepresentasikan ruang dan bagaimana ruang representasional di masyarakat. Lefebvre mengemukakan bahwa ruang sosial terbentuk berdasarkan dengan produk sosial yang ada pada masyarakat. (hal.33)

B. Perumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang di atas, terjadinya kontradiksi antara keinginan pemerintah dan keinginan warga Dukuh Pangukrejo, sehingga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak ditaati. Penelitian ini hendak membahas:

1. Bagaimana produksi ruang di Dukuh Pangukrejo?
2. Bagaimana resistensi warga di Dukuh Pangukrejo?

C. Tujuan Penelitian

Mengungkap bagaimana konstruksi ruang dan resistensi warga di Dukuh Pangukrejo.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh buku yang berjudul "The Art of Not Being Governed" karya James Scott (2009) dan beberapa riset terdahulu yang relevan terkait dengan kebencanaan. Penelitian terdahulu tersebut berdasarkan dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh Smith (*Anthropological Research on Hazard and Disasters,* 1996) masuk ke dalam topic *the behavioral response approach* (pendekatan respon perilaku) yang meliputi: *politics and power* (politik dan kekuasaan), *culture and catastrophe* (budaya dan malapetaka).

Topik penelitian pertama, politik dan kekuasaan, tentang kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan Kawasan Rawan Bencana

serta bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan di masyarakat serta peran pemerintah dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana, seperti penelitian milik Sri Aminatun, Restu Faizah dan Dwi Wantoro (Implementasi Kebijakan Relokasi Permukiman terhadap Ancaman Tanah Longsor: Studi Kasus Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015), Korlena, Achmad Djunaedi, Leksono Probosubanu, dan Nurhasan Ismail (Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan kembali di Kawasan Rawan Bencana. Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA), CB Herman Edyanto (Analisa Kebijakan Penataan Ruang Untuk Kawasan Rawan Tsunami di Wilayah Pesisir, 2011), yang mana penelitian terdahulu menemukan penanganan dalam menghadapi pengaruh bencana tsunami sangat diperlukan demikian dengan mitigasi struktural penataan bangunan serta kebijakan dari pemerintah diharapkan sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat sehingga mitigasi yang dilakukan tepat. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau belum dan bagaimana kebijakan penataan ruang tersebut dibuat, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kesimpulan kebijakan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya pembangunan hutan mangrove di pesisir bertujuan untuk meminimalisir bahaya.

Penelitian berikutnya yaitu Paulus Bawole (Program relokasi permukiman berbasis masyarakat untuk korban bencana alam letusan merapi tahun, 2010). Penelitian ini menjelaskan program relokasi, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat menjadi korban letusan Gunung Merapi yang rumah dan ladangnya hancur disebabkan awan panas. Perencanaan relokasi di lereng merapi melibatkan masyarakat dari proses awal hingga akhir sehinga diharapkan masyakarat dapat melakukan persiapan terhadap pemukiman yang nantinya akan menjadi tempat tinggal, masyarakat juga diharapkan dapat merencanakan usaha apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Mulai dari pembuatan *site plan-transfer knowledge-land cleaning* di lokasi site yang melibatkan masyarakat, sehingga program relokasi yang diusulkan oleh pemerintah dapat disepakati masyarakat setempat.

Topik kedua *Culture and Catastrophe* (Budaya dan Malapetaka). Sikap masyarakat yang tidak ingin melakukan relokasi disebabkan oleh beberapa faktor

serta bagaimana peran masyarakat pada kesiapsiagaan bencana maupun persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Konstruksi ruang yang terbentuk pada masyarakat mungkin dipengaruhi oleh budaya maupun lingkungan serta kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat seperti penelitian Dwi Rustiono Widodo, Sutopo Purwo Nugroho, Donna Asteria (Analisa penyebab masyarakat tetap tinggal di KRB Gunung Merapi: Studi di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017). Pada penelitian ini peneliti memetakan factor-faktor serta menganalisis penyebab masyarakat tetap tinggal di KRB, dengan hasil penelitian adanya penolakan relokasi, disebabkan karena faktor sosial, faktor lingkungan dan faktor ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat tetap tinggal di KRB.

Yasin Yusuf (Hidup Bersama Risiko Bencana: Konstruksi Ruang dalam Perspektif Ruang Relasional, 2014). Rumusan masalah pada penelitian terdahulu ini adalah adanya perbedaan/ kekontrasan antara rencana dan implementasi terkait dengan kebijakan kawasan rawan bencana, yang dikhususkan pada kontrol penggunaan ruang yang rentan terhadap bencana. Penelitian ini memaparkan dampak dari bencana tidak hanya negatif namun terdapat dampak positif dari bencana tersebut, namun konstruksi ruang disini dipandang dari segi teori perencanaan, dan menggunakan konsepsi produksi ruang milik Lefebvre serta dalam penelitian ini lebih membahas komunitas yang ada di Kawasan Rawan Bencana Merapi yang memiliki pandangan lain terhadap terjadinya bencana, bencana dipandang sebagai hal yang positif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya sehingga masyarakat dapat hidup bersama dengan bencana.

Berdasarkan semua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang konstruksi ruang yang dibentuk warga lereng merapi dalam memandang kawasan rawan bencana. Mayoritas penelitian terdahulu membahas tentang faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak ingin melakukan relokasi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukaan penataan ruang dan terdapat bebapa penelitian terdahulu yang membahas ruang namun bukan dalam ranah sosial. Sehingga letak penelitian ini adalah bagaimana konstruksi ruang masyarakat dalam melihat kawasan rawan bencana.

E. Kerangka Teori

1. Konstruksi Ruang

Teori tentang *space* atau ruang telah dibahas oleh Henry Lefebvre dalam *(The Production of Space)*, seorang filsuf dari Perancis yang merupakan profesor sosiologi di Universitas Strasbourg, Perancis dengan pemikirannya yang terpengaruh oleh Karl Marx, G.W.Hegel, dan Friedrich Engels sehingga ia terkenal sebagai Marxian. Bukunya yang berjudul *The Production of Space* ditulis selama 6 tahun. Awalnya buku Lefebvre tentang space tidak begitu dikenal, dengan judul aslinya yang bernama *La production de l'escape*, namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak peneliti yang menggunakan buku Lefebvre sebagai rujukan, karena belum ada yang mengemukakan ruang dalam ranah sosial secara detail. Menurut Henry Lefebvre *(Social) space is (social) product*, ruang sosial adalah produk sosial. Ruang terbentuk berdasarkan produk sosial yang ada di masyarakat. Ruang adalah nyata dalam artian bahwa komoditas adalah nyata karena merupakan produk (sosial). (Lefebvre ,*terj*. Donald Nicholson & Smith, 1991, hal. 26).

Ruang merupakan konstruksi sosial yang mempengaruhi tindakan dan persepsi subjek di dalamnya. Ruang adalah produk sosial yang berkaitan dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Lefebvre (1991) membagi tiga konseptual bagaimana suatu ruang sosial dihasilkan (hal.33) :

a. *Spatial Practices* (Praktik Spasial)

   Ruang yang dipresepsikan berdasarkan dengan ruang yang digunakan sehingga membentuk atau menghasilkan praktik ruang dalam kehidupan sehari-hari, terdapat hubungan antara objek dan produk, anggota masyarakat memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap kepemilikan atas ruang. Praktik Spasial biasa disebut sebagai *lived space*

b. *Representations of Space* (Representasi Ruang)

   Representasi ruang oleh sistem modern berdasarkan dengan pengetahuan tertentu atau ruang yang muncul dari konsepsi orang atau beberapa orang pada umumnya dengan pengetahuan tertentu yang memaksakan suatu pola hubungan atas pemakaian suatu ruang.

c. *Representational Space* (Ruang Representasional)

   Ruang yang diimajikan secara kultural, ritual, keyakinan tentang ruang, simbol simbol yang mempresentasikan ide tertentu, dialami secara pasif dan berkaitan dengan keyakinan yang turun-temurun. (Lefebvre, 1991, hal. 38-

39). Ruang representasi mengacu pada proses pemaknaan yang menghubungkan dirinya dengan simbol, bisa diambil dari alam (Setyawan, hal.3)

Ruang menurut Lefebvre berdasarkan konsep produksi ruang dibagi menjadi tiga pengalaman :

a. *Perceived space*: Ruang memiliki aspek yang dapat ditangkap oleh panca indera dapat dilihat, didengar, dicium, disentuh dan dirasakan yang pada akhirnya membentuk sebuah "ruang"
b. *Conceived space*: Ruang tidak dapat dipersepsi tanpa memahaminya di dalam pikiran. Berbagai elemen dirangkai untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh, kemudian disebut sebagai ruang merupakan tindakan pikiran dalam memproduksi ruang
c. *Lived space*: pengalaman hidup di dalam ruang, hal-hal yang dialami dalam kehidupan sehari hari. Lefebvre menegaskan: bahwa realitas hidup, pengalaman praktis, tidak akan selesai melalui analisis teoritis. Akan selalu terdapat surplus, sisa, atau residu berharga yang tidak terjelaskan atau teranalisis yang terkadang hanya dapat dinyatakan melalui cara cara artistic. (Setyawan, hal.3).

Ruang menurut pemahaman Lefebvre didirikan oleh kondisi-kondisi material yang konkret, ruang juga terdiri dari pengalaman hidup manusia yang aktif (Robert, 2014)

2. Kawasan Rawan Bencana

Lucas Sasongko dalam bukunya yang berjudul Merapi dan Orang Jawa (Persepsi dan Kepercayaannya) menjelaskan tentang munculnya Kawasan Rawan Bencana di Indonesia, hal ini bermula dari penelitian yang dilakukan oleh R.D.M Verbeek (1845-1926), merupakan peneliti dari Belanda yang melakukan Penyelidikan Gunung Api di Pulau Jawa dengan tujuan memberikan pertolongan kepada korban letusan gunung berapi. (Triyoga, 2010, hal. 127).

Stehn sebagai Pimpinan Dinas Penelitian Gunung Api telah memetakan daerah bahaya Merapi pada tahun 1935 beserta rute pengungsian jika terjadi letusan kembali. Pemetaan tersebut didasarkan pada letusan-letusan sebelumnya dan jumlah penduduk yang menjadi korban. Daerah pemetaan bahaya tersebut dibagi

menjadi tiga, yaitu: daerah terlarang, daerah bahaya satu dan daerah bahaya dua. Peta daerah bahaya tersebut, seiring berjalannya waktu terus diperbaiki dan disempurnakan, daerah yang masuk ke dalam rawan bencana disarankan untuk dikosongkan dari permukiman penduduk, namun hal tersebut kurang mendapatkan respon yang baik karena masyarakat setempat merasa dirugikan. Dengan adanya permukiman penduduk yang masih menetap di daerah terlarang membuat pemerintah Belanda khawatir, jika lahan hutan digunakan untuk perladangan. Tahun 1912 Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan untuk menjadikan ladang-ladang milik masyarakat yang berada di sekitar lereng Merapi menjadi Hutan Lindung milik pemerintah. (Triyoga, 2010, hal. 128).

Pasca kemerdekaan, lembaga kegunungapian yang dikelola oleh Pemerintah Jajahan Belanda beralih ke Pemerintah Republik Indonesia, dimulai dengan melakukan perubahan pada struktur organisasi, pengelolaan dan lain lain. Nama Penelitian Gunung Api diubah menjadi Direktorat Vulkanologi berpusat di Bandung, yang memiliki tugas untuk menaungi setiap pos-pos yang melakukan pemantauan di seluruh gunung api di Indonesia. (Triyoga, 2010, hal. 129).

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, melihat dari sejarah penolakan warga melakukan relokasi sudah terjadi sejak dahulu, bahkan ketika pertama kali kawasan rawan bencana dibentuk di kawasan merapi, sehingga sikap dari warga Pangukrejo yang menolak melakukan relokasi ke hunian tetap memiliki kaitan dengan sejarah. Awal mulanya kawasan yang dilarang dijadikan pemukiman dinamakan daerah terlarang, daerah bahaya satu dan daerah bahaya dua.

Namun saat ini nama daerah bahaya satu dan dua menjadi KRB-1, KRB-2, KRB-3, jika dilihat dari pemberian nama “daerah terlarang” membuat orang beranggapan bahwa daerah tersebut tidak boleh dihuni, dijadikan sebagai pemukiman oleh masyarakat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar pada saat itu, pun saat ini nama “daerah terlarang” menjadi KRB-3, yang mana tidak semua orang mengerti ataupun tahu bahwa daerah tersebut adalah daerah yang tidak boleh ada permukiman / tidak boleh dihuni. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 36 ayat 1b yang secara ringkas menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya menjadikan daerah terlarang sebagai permukiman dan pemerintah memiliki wewenang akan hal

tersebut. Wilayah KRB1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan jarak wilayah dengan ancaman bahaya berdasarkan erupsi sebelumnya.

Kurun waktu 20 tahun terakhir, wilayah KRB 1,2, dan 3 mengalami pergeseran, hal ini disebabkan adanya perubahan pada setiap erupsi yang terjadi, kawasan KRB 1, 2, dan 3 selalu berubah pada setiap pasca erupsi. KRB memiliki klasifikasi tingkatan, hal tesebut bertujuan untuk menentukan tindakan penataan dan pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan pada kawasan rawan bencana.

3. Resistensi

James Scoot dalam bukunya *The Art of Not Being Governed* tentang resistensi masyarakat Zomia yang memilih untuk tinggal di Dataran Tinggi sebagai bentuk terhadap penghindaran terhadap negara.

Menurut Scott tujuan dari adanya resistensi adalah sebuah perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok tertentu. Perlawanan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perlawanan Publik (Terbuka) atau *public transcript* : Bentuk perlawanan yang dapat diamati , konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih.
2. Perlawanan Tersembunyi (Tertutup) atau *hidden transcript* adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Peneitian

Penelitian ini berangkat dari paradigma kritis, mengungkap sekaligus peka terhadap relasi kuasa. Relasi kuasa muncul karena diduga adanya perbedaan konstruksi ruang antara warga dengan pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk menentukan serta membuat aturan terkait dengan larangan bermukim di kawasan rawan bencana 3, namun pada faktanya masih banyak warga yang menetap di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Dukuh Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Aktivitas penelitian dilaksanakan kurang lebih selama satu tahun. Hal pertama yang dilakukan peneliti ialah melakukan observasi di lokasi penelitian, kemudian menemui *key person* atau Kepala Dukuh Pangukrejo untuk melakukan wawancara, atas rekomendasi Kepala Dukuh Pangukrejo , peneliti mendapatkan beberapa daftar nama untuk dijadikan sebagai narasumber. Peneliti menemui narasumber yang terdapat di dalam daftar, dan melakukan wawancara.

3. Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian ini karena untuk mendapatkan data terkait bagaimana konstruksi ruang yang dibentuk. Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah warga Dusun Pangukrejo, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* dengan model *Snow Ball*, dengan Kepala Dukuh Pangukrejo sebagai *key person* kemudian peneliti melakukan wawancara kepada warga Dukuh Pangukrejo. Instansi pemerintahan yang dijadikan sebagai narasumber ialah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

Tabel 1.1
Nama Narasumber Dan Kapasitasnya

No	Nama	Kapasitas	Waktu

1	Bapak Subagyo	Kepala Dukuh sekaligus warga asli Pangukrejo yang memahami seluk beluk Pangkrejo, masyarakat maupun pemerintah.	01 Oktober 2018 dan 06 Oktober 2018
2	Bapak Pujo	Warga asli Dukuh Pangukrejo	04 Oktober 2018
3	Ibu Jumiati	Warga asli Dukuh Pangukrejo	06 Oktober 2018
4	Bu Wardisono	Warga asli Dukuh Pangukrejo	25 Oktober 2018
5	Bapak Bardi	Warga asli Dukuh Pangukrejo	18 November 2018
6	Agus BPPTKG	Seksi kegunungapian BPPTKG	7 Maret 2019
7	Fajar Radite	Founder Sekolah Gunung Merapi yang tinggal di Dukuh Pangukrejo	4 April 2019

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan sebagai penunjang penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. (Mason, 2002, hal 54).

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan seperti pada umumnya, jika pada penelitian ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur yang termasuk ke dalam *in-dept interview* (Sugiyono, 2012, hal. 233), dengan melakukan wawancara kepada *key person* atau yang memiliki kedudukan di Dukuh Pangukrejo yaitu Kepala Dukuh Pangukrejo, kemudian peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa tokoh yang direkomendasikan oleh kepala dukuh, setelah itu melakukan wawancara kepada warga asli Pangukrejo yang mengalami erupsi merapi dan yang memilih untuk tetap tinggal di daerah Kawasan Rawan Bencana. Beberapa pertanyaan inti yang diajukan kepada narasumber:

1) Mengapa tata ruang Dukuh Pangukrejo dibuat seperti saat ini?
2) Bagaimana dengan bangunan kosong yang terdapat di sekitar KRB III?
3) Menurut bapak bagaimana tempat yang bapak/ibu tinggali sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai KRB oleh pemerintah?
4) Menurut bapak/ibu kawasan rawan bencana itu apa?

5) Sikap bapak terhadap kawasan rawan bencana 3 ini bagaimana pak/bu?
6) Alasan bapak/ ibu memilih untuk tetap tinggal di KRB 3 apa?
7) Menurut bapak/ ibu KRB3 ini aman atau tidak?
8) Batas KRB3 mana saja?

b. Observasi

Observasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan observasi semi partisipan. Pada teknik pengumpulan data ini model observasi yang digunakan adalah observasi naturalistik. Model wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Peneliti mengikuti kegiatan warga Dukuh Pangukrejo sebagai bentuk kegiatan observasi sebagai volunter di Sekolah Gunung Merapi di kawasan Pangukrejo, peneliti mengamati aktivitas warga Dukuh Pangukrejo setiap harinya pada pagi, siang, maupun sore hari. Serta melakukan observasi mendalam ketika melakukan wawancara dengan narasumber, selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap tempat-tempat yang memiliki tanda batasan antara milik pemerintah dengan warga.

c. Penelusuran dokumen

Penelusuran dokumen yaitu dengan mengumpulkan dokumen dokumen yang ada, baik itu foto, video, maupun naskah. Hal ini dilakukan hanya sebagai data pendukung terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen yang dikumpulkan oleh penulis berupa foto bentuk protes warga di yang diperoleh dari website sekolah gunung merapi terkait lava tour, serta beberapa dokumen terkait penataan ruang di KRB yang didapatkan dari Nur Cholik.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tahapan dalam analisis data yaitu: reduksi data, kategorisasi data dan penyajian data. Pada reduksi data peneliti membaca berulang kali data yang diperoleh juga mereduksi data atau informasi yang sama sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dengan melihat data mana yang relevan untuk digunakan. Kemudian kategorisasi data ialah menyatukan atau mengklasifikasi data *(coding)* yang memiliki kemiripan atau kecocokan dengan data lain, pada kategorisasi data ini dilakukan *labelling* sehingga memudahkan peneliti dalam membaca data yang telah disatukan. Tahap terakhir dari analisis data yaitu menyajikan data pada hasil penelitian. (Mason, 2002, hal.148-169).

Analisis data menurut Sugiyono (2012), terbagi menjadi tiga, yaitu :

1) Reduksi Data: Setelah mendapatkan data dari lapangan, peneliti melakukan reduksi data, yaitu memilih data yang relevan terkait dengan penelitian.
2) Penyajian Data: Mengumpulkan hasil reduksi data menjadi satu, merubah menjadi.
3) Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti.